

MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN TAPIN
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2025

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN				TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III				FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT			
								K	Rp			K		Rp
A	Meningkatnya efektivitas perencanaan pembangunan daerah terhadap target pembangunan daerah		Tingkat Capaian Tujuan Pembangunan Daerah	100			Persen			Persen				
I.	meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	86			Poin		0	Nilai		Rekomendasi LHE yang relatif lama untuk dapat ditindaklanjuti secara	LHE memerlukan waktu yang relatif lama untuk dapat ditindaklanjuti secara	Memaksimalnya tindaklanjuti rekomendasi LHE dan secara rutin terus berusaha
II.	meningkatnya Profesionalisme ASN Perangkat Daerah		Indeks Profesionalisme ASN (IP-ASN) Perangkat Daerah	80			Poin		0	Nilai		Pemberian kesempatan pengembangan kompetensi kepada setiap pegawai.	Pengukuran data IP-ASN dilakukan pada akhir tahun, sehingga data realisasi belum	Memastikan semua pegawai mendapatkan kesempatan pengembangan kompetensi
1.	Meningkatnya Capaian SAKIP	5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Komponen AKIP: Perencanaan Kinerja Pengkukuran Kinerja Pelaporan Kinerja Evaluasi Internal	26,00 26,00 12,00 18,00	9.667.331.359		Persen	5.811.549.459	-	Score	60,12	Pra-evaluasi SAKIP Bappellitbang telah dilakukan, semua bukti dukung telah dikumpulkan dan dilampirkan sebagai bentuk pelaporan kinerja	Kemungkinan terjadi penurunan nilai SAKIP, namun masih ada pada predikat yang sama yaitu A.	Menindaklanjuti rekomendasi pra-evaluasi dan rekomendasi LHE SAKIP Bappellitbang tahun 2024 untuk dapat dilakukan pembenahan ditahun 2025 untuk
	Meningkatnya kinerja tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan		persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100,00		100	Persen		100	Persen		Tidak ada temuan / LHP	Kegiatan yang ditargetkan terealisasi pada triwulan IV sehingga belum dapat diukur kinerja capaiannya	Memastikan seluruh pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai dengan ketentuan
	Meningkatnya kualitas kinerja ASN		Persentase ASN dengan capaian kinerja >90Persen	100,00			Persen		-	Persen		Kinerja ASN Bappellitbang per triwulan III T.A 2025 telah menunjukkan hasil yang baik.	Kegiatan yang ditargetkan terealisasi pada triwulan IV sehingga belum dapat diukur kinerja capaiannya	Memastikan semua kegiatan yang belum terealisasi atau ditargetkan terealisasi di Tw IV agar dapat berjalan sesuai
	Meningkatnya Pelayanan Sekretariat		Indeks kepuasan pelayanan ASN Bappellitbang	4,00			Poin		-	Score		#####	Kegiatan yang ditargetkan terealisasi pada triwulan IV sehingga belum dapat diukur kinerja capaiannya	Memastikan semua keperluan administrasi kepegawalan dilaksanakan dengan baik, melakukan pemeliharaan BMD/sarana dan prasarana sesuai keperluan
1	Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja perangkat daerah	5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tindaklanjuti perencanaan kinerja atas rekomendasi dari mitra kerja Bappellitbang	100,00	84.914.000,00	100	Persen	68.823.600	100,00	Persen	81,05	Dokumen rencana kerja Bappellitbang telah disusun dengan mempertimbangkan rekomendasi dan keperluan mitra kerja Bappellitbang	Proses penyusunan dokumen perencanaan yang memakan waktu relatif lama	Memastikan seluruh kegiatan yang disusun dalam dokumen perencanaan telah mengakomodir keperluan dan selaras dengan program prioritas daerah
	meningkatnya kualitas pelaporan kinerja perangkat daerah		Persentase rekomendasi LHE AKIP yang ditindak lanjut	100,00		100	Persen		100,00	Persen		LHE AKIP Tahun 2023 telah ditindaklanjuti dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2024	Tindaklanjuti memerlukan waktu untuk dapat ditindaklanjuti secara keseluruhan	
			Persentase laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan kinerja yang ditindaklanjuti	100,00		75	Persen		75,00	Persen		kegiatan monev dilaksanakan rutin per triwulan bersama dengan mitra bidang untuk mengetahui realisasi pelaksanaan setiap kegiatan dan memberikan rekomendasi atas pelaksanaan kegiatan	memerlukan waktu untuk dapat mengumpulkan semua data dan mengkompilasi semua data	
1	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	26.114.000	5	Dokumen	20.500.000	100	Dokumen	78,50	Dokumen perencanaan telah disusun dan disampaikan	Proses penyusunan dokumen yang relatif lama	Memastikan seluruh kegiatan yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan
2	tersedianya laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	11	58.800.000	10	Laporan	48.323.600	91	Laporan	82,18	Laporan Bappellitbang telah disampaikan	Proses pengumpulan dan kompilasi data yang relatif lama	Meningkatkan kualitas pelaporan dengan menyertakan / memperbaiki cara penyampaian yaitu salah satu caranya dengan perbaikan kualitas narasi
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											95			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			
2	Meningkatnya kualitas Administrasi keuangan perangkat daerah	5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Surat Pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100	5.539.908.273	70	Persen	4.154.919.273	70	Persen	75,00	Setiap dokumen SPJ telah melalui multi-verifikasi oleh Laporan keuangan akhir tahun dan semesteran telah	Jumlah dokumen SPJ yang relatif banyak	Terus memastikan seluruh dokumen SPJ telah melewati
			Persentase laporan keuangan yang disampaikan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)	100		100	Persen		100	Persen				
3	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.2.01.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	31	5.493.558.273	31	Orang	4.121.269.273	100,00	Orang	75,02	Bertambahnya jumlah ASN Bappellitbang telah diakomodir dengan baik dengan	Koordinasi baik diperlukan untuk memastikan perhitungan gaji telah sesuai	Memastikan ketersediaan anggaran untuk pembayaran gaji ASN
4	Tersedianya laporan keuangna akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	29.300.000	1	laporan	20.525.000	100,00	laporan	70,05			

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN					TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III						FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	
5	Tersedianya laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	17.050.000	1	laporan	13.125.000	100,00	laporan	76,98			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											100			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN					TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III						FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	
3	meningkatnya tata kelola administrasi kepegawaian	5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapatkan pelayanan administrasi Kepegawaian dengan baik	100	2.758.990.370	75	Persen	960.708.729	75	Persen	34,82	Pelayanan administrasi pegawai seperti kenaikan pangkat, herkal, dll dilakukan		memastikan setiap pelayanan administrasi pegawai terus berjalan sesuai
6	Tersedianya paket komponen listrik/penerangan bangunan kantor	5.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	34.692.800	1	Paket	2.580.911	100,00	Paket	7,44	Penyediaan telah dilakukan berdasarkan analisis keperluan	Kemungkinan adanya keperluan yang tidak termasuk dalam perencanaan	Memastikan seluruh keperluan yang belum dapat diakomodir akan dapat
7	tersedianya paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	277.195.800	1	Paket	20.477.100	100,00	Paket	7,39	Penyediaan telah dilakukan berdasarkan analisis	Kemungkinan adanya keperluan yang tidak	Memastikan seluruh keperluan yang belum dapat
8	tersedianya paket bahan logistik kantor	5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	284.081.070	1	Paket	132.885.325	100,00	Paket	46,78	Penyediaan telah dilakukan berdasarkan analisis	Kemungkinan adanya keperluan yang tidak	Memastikan seluruh keperluan yang belum dapat
9	tersedianya paket Barang Cetak dan Penggandaan	5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1	29.115.400	1	Paket	10.760.350	100,00	Paket	36,96	Penyediaan telah dilakukan berdasarkan analisis		
10	tersedianya paket Bahan / Material	5.01.01.2.06.07 Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	131.638.300	1	Paket	16.708.396	100,00	Paket	12,69	Penyediaan telah dilakukan berdasarkan analisis	Kemungkinan adanya keperluan yang tidak	Memastikan seluruh keperluan yang belum dapat
11	tersedianya laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	5.01.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	34.350.000	1	Laporan	4.565.000	100,00	Laporan	13,29	Penyediaan telah dilakukan berdasarkan analisis	Jumlah tamu yang tidak konsisten memerlukan	memastikan ketersediaan logistik pendukung fasilitas
12	tersedianya laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1.967.917.000	1	Laporan	772.731.647	100,00	Laporan	39,27	Penyediaan telah dilakukan berdasarkan analisis	Kemungkinan adanya keperluan yang tidak	Memastikan seluruh keperluan yang belum dapat
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											100			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			
5	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	5.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	83,50	49.504.800,00	85	Persen	7.994.300	101,80	Persen	16,15	Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan analisis keperluan dan berpedoman pada RKBMD	Usia beberapa BMD yang mungkin sudah tergolong tua sehingga memerlukan perhatian lebih (pemeliharaan)	Memastikan semua barang dalam kondisi baik melalui pemeliharaan, melakukan pengadaan sesuai keperluan
16	Tersedianya unit Peralatan dan Mesin	5.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10	49.504.800	8	unit	7.994.300	80	unit	16	Pengadaan barang dilakukan sesuai dengan analisis keperluan dan berpedoman pada RKBMD	barang yang diperlukan tidak bisa ditemukan/tersedia di UMKM Lokal	
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											80			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Tinggi			
4	Meningkatnya ASN yang berkualitas	5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kelulusan ASN Perangkat Daerah yang mengikuti Peningkatan kapasitas	100	904.991.192	75	Score	434.135.212	75,00	Score	47,97	tersedianya kesempatan pengembangan kompetensi untuk ASN	Memastikan kesempatan pengembangan kompetensi telah sesuai dengan tupoksi	
13	Tersedianya laporan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	573.843.592	1	Laporan	342.567.738	100,00	Laporan	59,70	Analisis keperluan telah dilakukan untuk memastikan		
14	Tersedianya laporan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	31.000.000	1	Laporan	12.500.000	100,00	Laporan	40,32	Analisis keperluan telah dilakukan untuk memastikan		
15	Tersedianya laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	5.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	300.147.600	1	Laporan	79.067.474	100,00	Laporan	26,34	Analisis keperluan telah dilakukan untuk memastikan		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											100			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			
6	Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah (BMD)	5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik	83,50	329.022.724,00	75	Persen	184.968.345	90	Persen	56,22	Pemeliharaan BMD dilakukan dengan baik oleh setiap pengguna barang	Jumlah BMD yang relatif banyak, diperlukan pendataan yang baik	Memastikan semua BMD telah mendapatkan pemeliharaan sesuai jadwal
17	Terpeliharanya dan terbayarkannya pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10	278.519.104	8	Unit	165.558.335	80,00	Unit	59,44	Pajak kendaraan telah dibayarkan sesuai jadwal oleh pengguna BMD atau melalui sub bagian umum dan		
19	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	5.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	50.503.620	15	Unit	19.410.010	75,00	Unit	38,43	Peralatan dan mesin telah dilakukan pemeliharaan		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											78			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (Persen)											87			
Predikat Kinerja Kegiatan											Tinggi			
III.	Meningkatnya Efektivitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah		Indeks Kualitas Perencanaan (IKP)	7,80			Poin			Poin		Proses perencanaan telah dilaksanakan	Survei untuk menentukan Indeks Kualitas Perencanaan	Memastikan pelaksanaan Survei IKP berjalan sesuai rencana
			Nilai Komponen AKIP- Perencanaan Kinerja	23,79			Poin			Poin		Kerjasama dan koordinasi oleh TIM SAKIP Daerah dalam	Diperlukan waktu untuk dapat menindaklanjuti semua rekomendasi	
			Rata-rata capaian IKU daerah	100,00			Persen			Persen		Monev IKU Daerah rutin dilakukan per triwulan untuk memantau kinerja		
			Rata-rata capaian IKU Perangkat daerah	100,00			Persen			Persen		Monev IKU Perangkat Daerah rutin dilakukan per triwulan untuk		

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN					TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III						FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT		
2.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Proses Perencanaan Pembangunan Daerah Tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	2.890.568.960	100	Persen	1.625.672.300	100,00	Persen	56,24	#####	<ul style="list-style-type: none"> OPD terlambat menyampaikan data-data terkait dokumen perencanaan dan evaluasi Gangguan pada SIPD-RI atau sistem perencanaan digital yang menyebabkan keterlambatan input data. Perencana di OPD masih terbatas secara jumlah dan kompetensi. 	<ul style="list-style-type: none"> Penegasan jadwal, monitoring progres secara berkala Pelatihan operator SIPD DAN koordinasi dengan pusat Bimtek regulasi & SIPD, pembentukan forum perencana lintas OPD, peningkatan kapasitas melalui pelatihan terstruktur 	
	Terlaksananya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil koordinasi dan partisipasi usulan masyarakat		Persentase partisipasi usulan masyarakat yang terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah	60		70	Persen		117,32	Persen					
	Terlaksananya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan		Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen					
	Terlaksananya Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan		Persentase Hasil Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen					
	Terlaksananya Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan		Persentase Hasil Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen					
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan		Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan	3		3	Dokumen		100,00	Dokumen		#####	<ul style="list-style-type: none"> Penginputan data yang terkadang terlambat dari jadwal yang telah ditetapkan Kapasitas SDM di beberapa OPD masih rendah dalam penyusunan dokumen Koordinasi antar OPD belum 	<ul style="list-style-type: none"> Bimtek perencana, pembaruan data sektoral, review dokumen lintas bidang, pendampingan OPD, evaluasi kualitas tahunan 	
	Meningkatnya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan		Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Utama Daerah	80		80	Persen		100,00	Persen		#####	<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi masih berupa file excel Kapasitas SDM movev masih terbatas Koordinasi antar bidang dan antar OPD masih kurang intensif Keterlambatan pelaporan hasil movev 		
7	Terlaksananya tahapan perencanaan Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan	5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase tahapan proses perencanaan Pembangunan Daerah sesuai ketentuan	100	1.930.273.560	100	Persen	1.184.282.300	100,00	Persen	61,35	Teralokasinya waktu perencanaan dengan baik	Adanya kendala (gangguan) pada aplikasi perencanaan (SIPD) yang mengakibatkan	Memastikan perencanaan pada tahun N+1 juga mengalokasikan waktu yang	
	terlaksananya musrenbang yang mengakomodir usulan masyarakat		Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam musrenbang	81		82,19	Persen		101,47	Persen		Semua usulan melalui proses verifikasi dan validasi	Adanya usulan yang tidak sesuai dengan program prioritas daerah sehingga	Memastikan seluruh usulan telah selaras dengan program prioritas	
	Tersedianya data sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan		Persentase data rancangan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang akan di lakukan sinkronisasi sesuai ketentuan	100		100	Persen		100,00	Persen		Telah diberikan pemberitahuan pelaksanaan kegiatan berupa undangan	Koordinasi (proses sinkronisasi) dengan pihak provinsi /pusat yang baik	Pentuan jadwal yang baik untuk memastikan semua elemen masyarakat dapat	Memberikan pemberitahuan awal kepada undangan untuk meningkatkan persentase
	Tersedianya rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk difasilitasi / dievaluasi sesuai ketentuan		Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk difasilitasi/dievaluasi sesuai ketentuan	3		3	Dokumen		100,00	Persen		Telah dilaksanakan sinkronisasi dengan pihak provinsi untuk memastikan		ketidaksiharan dokumen perencanaan daerah dengan provinsi	Memberikan pemberitahuan awal kepada undangan untuk meningkatkan persentase
	Tersedianya rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk direviu sesuai ketentuan		Jumlah rancangan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk direviu sesuai ketentuan	3		3	Dokumen		100,00	Persen		Rancangan dokumen perencanaan diasistensi oleh inspektoral, penyusunan			
	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Sesuai dengan ketentuan		Persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	100		100	Persen		100,00	Persen				rekomendasi memelukan waktu untuk koordinasi dan ditindaklanjuti	
	1.00		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam rancangan awal RPJMD/RKPD	5.01.02.2.01.01 Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratis)	3	70.175.000	3	Laporan	36.730.000		100,00	Laporan	52,34	
1.00	Terlaksananya Forum SKPD/Lintas SKPD	5.01.02.2.01.04 Koordinasi pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	55.720.000	1	Berita Acara	33.320.000	100,00	Berita Acara	59,80				
0.00	terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	2	333.734.840	2	Berita Acara	214.915.000	100,00	Berita Acara	64,40	Pelaksanaan musrenbang dilakukan / dibersamai oleh mitra bidang hanelitbang	Koordinasi dengan pihak ketiga untuk memastikan pelaksanaan kegiatan tidak		
538,00	Tersedianya usulan-usulan yang telah terverifikasi oleh kecamatan	5.01.02.2.01.06 Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	405	396.873.720	435	Usulan	373.875.000	107,41	Usulan	94,21	Proses verifikasi usulan dilakukan dengan baik	Usulan yang tidak selaras dengan program prioritas daerah	Memastikan seluruh usulan yang terverifikasi telah selaras dengan program prioritas	
0.00	ditetapkannya dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten/kota	5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD,RPJMD/RKPD)	2	1.073.770.000	2	Dokumen	525.442.300	100,00	Dokumen	48,93	Dokumen perencanaan telah melalui proses fasilitasi			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											101				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi				
8	Terlaksananya penyusunan rencana aksi Satu Data Indonesia yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan	5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daeah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rencana aksi Satu Data Indonesia yang terlaksana tepat waktu	100	480.152.000	100	Persen	345.870.000	100	Persen	72,03	Pelaksanaan sesuai dengan timeline/jadwal, dan telah dikordinasikan dengan baik	Jumlah data yang relatif banyak		

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN					TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III						FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	
	terlaksananya Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD)		Persentase Pemenuhan Data Statistik Sektoral Daerah (DSSD) yang telah disepakati dalam berita acara forum satu data	80		100	Persen		125	Persen		Telah dilaksanakan desk penginputan data untuk memastikan ketersediaan data	memastikan kesempatan pengembangan kompetensi telah sesuai dengan tupoksi	Memastikan seluruh data yang diperlukan telah terisi pada aplikasi E-walidata
24	Terinputnya Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1	175.000.000	1	Masukan	124.000.000	100,00	Masukan	70,86			
26	Terbinanya Sumber daya manusia perangkat daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	5.0.02.2.02.02 Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang dibina dalam pemanfaatan dana dan informasi	53	305.152.000	53		221.870.000	100,00	Orang	72,71	Pembinaan telah dilakukan berkoordinasi dengan pihak BPS dan kominfo		
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											100			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN					TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III			75,00	Persen	19,89	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT		
9	Tertindakannya Monitoring Indikator Kinerja Utama Daerah	5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Rekomendasi monitoring dan evaluasi indikator kinerja utama daerah yang di tindaklanjuti	100	480.143.400	75	Persen	95.520.000	75,00	Persen	19,89				
Jumlah rekomendasi monev IKU daerah			10		7	Buah		70,00	Persen						
25	Tertindakannya pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten/kota	5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1	372.943.400	1	Laporan	46.700.000	100,00	Laporan	12,52				
26	tersusunnya laporan hasil Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4	107.200.000	3	Laporan	48.820.000	75,00	Laporan	45,54				
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											88				
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Tinggi				
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (Persen)											97				
Predikat Kinerja Kegiatan											Sangat Tinggi				
3	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINERJISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Tepat waktu dan sesuai ketentuan	100	632.448.400	100	Persen	459.603.100	100,00	Persen	72,67				
			Persentase Proses Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM Tepat waktu dan sesuai ketentuan	100		100	Persen		100,00	Persen					
	Tertindakannya tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil koordinasi		Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen			Semua rekomendasi hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh mitra perencana daerah	Proses tindak lanjut yang memakan waktu relatif lama.	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
			Persentase Hasil Koordinasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen			Semua rekomendasi hasil koordinasi dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh mitra perencana daerah	Proses tindak lanjut yang memakan waktu relatif lama.	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
	Tertindakannya Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan		Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		75	Persen		75,00	Persen			Semua rekomendasi hasil sinkronisasi dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh mitra perencana daerah	Proses tindak lanjut yang memakan waktu relatif lama.	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
			Persentase Hasil Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		75	Persen		75,00	Persen			Semua rekomendasi hasil sinkronisasi dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh mitra perencana daerah	Proses tindak lanjut yang memakan waktu relatif lama.	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
	Tertindakannya Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan		Persentase Hasil Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen			Semua rekomendasi hasil verifikasi dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh mitra perencana daerah	Proses tindak lanjut yang memakan waktu relatif lama.	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
			Persentase Hasil Verifikasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen			Semua rekomendasi hasil verifikasi dapat ditindaklanjuti dengan baik oleh mitra perencana daerah	Proses tindak lanjut yang memakan waktu relatif lama.	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
	Tertindakannya Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah Sesuai dengan ketentuan		Persentase Hasil Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen			Koordinasi baik dengan pihak reviewer (Inspektorat) dalam proses pelaksanaan reviu dan temuan hasil reviu atas perencana daerah		Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
			Persentase Hasil Reviu Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM yang ditindaklanjuti sesuai rekomendasi	100		100	Persen		100,00	Persen			Koordinasi baik dengan pihak reviewer (Inspektorat) dalam proses pelaksanaan reviu dan temuan hasil reviu atas perencana daerah		Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan		Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur Sesuai dengan ketentuan	100		100	Persen		100,00	Persen			Proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat telah mengacu/berpedoman pada Dermasdaori atau laman	Proses tindak lanjut perangkat daerah yang relatif lama sehingga dapat mengganggu jalannya proses perencanaan	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
			Persentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM Sesuai dengan ketentuan	100		100	Persen		100,00	Persen			Proses penyusunan dokumen perencanaan perangkat telah mengacu/berpedoman pada Dermasdaori atau laman	Proses tindak lanjut perangkat daerah yang relatif lama sehingga dapat mengganggu jalannya proses perencanaan	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
			Persentase Keselarasan Renja Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terhadap RKPd (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100		100	Persen		100,00	Persen			Proses penyusunan dokumen perencanaan melalui proses asistensi yang meliputi proses verifikasi dan validasi		Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
	Meningkatnya tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi perencanaan dan pembangunan		Persentase Keselarasan Renja Bidang Sosial dan SDM terhadap RKPd (Program, Kegiatan, Indikator, Target Kinerja dan Pagu Indikatif)	100		100	Persen		100,00	Persen			Proses penyusunan dokumen perencanaan melalui proses asistensi yang meliputi proses verifikasi dan validasi		Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Dermasdaori 86.Tabun 2017)
Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Infrastruktur		70%		100	Persen		100,00	Persen			proses tindak lanjut rekomendasi oleh perangkat daerah yang memakan waktu relatif lama	Proses tindak lanjut rekomendasi oleh perangkat daerah yang memakan waktu relatif lama	Memastikan seluruh rekomendasi telah dicatat dalam bentuk berita acara dan dibagikan salinan kepada		
			Persentase Implementasi Rekomendasi monitoring dan evaluasi Indikator Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial dan SDM	70%		100	Persen		100,00	Persen			Memastikan seluruh rekomendasi telah dicatat dalam bentuk berita acara dan dibagikan salinan kepada		

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN					TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III			75	Persen	80,59	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	
10	terlaksananya koordinasi perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase perangkat daerah sub bidang Sosial yang mendapatkan rekomendasi pada forum koordinasi perangkat daerah	100	318.435.000	75	Persen	256.632.500	75	Persen	80,59	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus memperhatikan timeline	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)
			persentase perangkat daerah sub bidang SDM yang mendapatkan rekomendasi pada forum koordinasi perangkat daerah	100		75	Persen	75	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)				
	terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah sub bidang Sosial	3		3	Laporan	100	Persen	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman		Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus memperhatikan timeline	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2)	
			Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah sub bidang SDM	3		3	Laporan	100	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)				
	Tersedianya data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Sosial sesuai ketentuan	100		100	Persen	100	Persen	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman		Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus memperhatikan timeline	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)	
			Persentase data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang SDM sesuai ketentuan	100		100	Persen	100	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)				
	Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen pemerintah daerah	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah perangkat daerah sub bidang Sosial yang menerima rekomendasi hasil sinkronisasi	9		9	Perangkat Daerah	100	Persen	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman		Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus memperhatikan timeline	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017 dan Inmendagri Nomor 2)	
			jumlah perangkat daerah sub bidang SDM yang menerima rekomendasi hasil sinkronisasi	8		8	Perangkat Daerah	100	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)				
	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Sosial	27		27	Dokumen	100	Persen	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman		Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus memperhatikan timeline	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)	
			jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang SDM	27		27	Dokumen	100	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)				
	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti perangkat daerah sub Bidang Sosial	100		100	Persen	100	Persen	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman		Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus memperhatikan timeline	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)	
			persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti perangkat daerah sub Bidang SDM	100		100	Persen	100	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)				
	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub bidang Sosial yang ditindaklanjuti	100		100	Persen	100	Persen	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman		Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus memperhatikan timeline	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)	
			Jumlah perangkat daerah sub bidang Sosial yang mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi	9		9	Perangkat Daerah	100	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)				
Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub bidang SDM yang ditindaklanjuti			100		100	Persen	100	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)					
Jumlah perangkat daerah sub bidang SDM yang mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi			8		8	Perangkat Daerah	100	Persen	Memastikan seluruh proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan (Permendagri 86 Tahun 2017)					
27	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	5.0.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir/penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3	61.460.000	3	Dokumen	54.155.000	100	Dokumen	88,11	Dokumen perencanaan (Renja Mumi 2026, Renja Perubahan 2025, Renstra PD 2025-2029) telah disusun dan	kemungkinan Keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan perangkat daerah	Memastikan perangkat daerah mengumpulkan dokumen perencanaan tepat waktu agar tidak menangan
28	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3	61.201.000	3	Laporan	58.796.000	100	Laporan	96,07	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan	Waktu tindaklanjut perangkat daerah yang relatif lama	Memastikan keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RKPd/RPJMMD dan sesuai
29	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	32.464.000	3	laporan	26.175.500	75	laporan	80,63	Monitoring dilakukan secara rutin per triwulan, proses monev dilakukan dengan pemantauan realisasi kegiatan	Kurangnya kemampuan intervensi dalam memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti	Memastikan seluruh rekomendasi untuk memastikan rekomendasi money telah ditindaklanjuti
30	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir/penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3	44.645.000	3	Dokumen	32.892.000	100	Dokumen	73,67	Dokumen perencanaan (Renja Mumi 2026, Renja Perubahan 2025, Renstra PD 2025-2029) telah disusun dan	kemungkinan Keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan perangkat daerah	Memastikan perangkat daerah mengumpulkan dokumen perencanaan tepat waktu agar tidak menangan
31	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.06 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3	86.201.000	3	Laporan	57.650.000	100	Laporan	66,88	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan	Waktu tindaklanjut perangkat daerah yang relatif lama	Memastikan keselarasan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RKPd/RPJMMD dan sesuai
32	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	4	32.464.000	3	laporan	26.964.000	75	laporan	83,06	Monitoring dilakukan secara rutin per triwulan, proses monev dilakukan dengan pemantauan realisasi kegiatan	Kurangnya kemampuan intervensi dalam memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti	Memastikan seluruh rekomendasi untuk memastikan rekomendasi money telah ditindaklanjuti
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											92			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN				TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN	
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III					FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT		
11	terlaksananya koordinasi perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	persentase perangkat daerah Sub bidang Ekonomi yang mendapatkan rekomendasi pada forum koordinasi perangkat daerah	90	139.075.000	75	Persen	117.145.000	83,33	Persen	84,23	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus	
	terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah		Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah sub bidang Ekonomi	3		3	Laporan		100,00	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus	
	Tersedianya data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan		Persentase data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi sesuai ketentuan	100		100	Persen		100,00	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus	
	Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen pemerintah daerah		Jumlah perangkat daerah sub bidang Ekonomi yang menerima rekomendasi hasil sinkronisasi	10		10	Perangkat Daerah		100,00	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus	
	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah		Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Ekonomi	3		3	Dokumen		100,00	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus	
	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti perangkat daerah sub Bidang Ekonomi	100		100	Persen		100,00	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus	
	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub bidang Ekonomi yang ditindaklanjuti	100		100	Persen		100,00	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus	
				Jumlah perangkat daerah sub bidang Ekonomi yang mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi	10		10	Perangkat Daerah		100,00		Persen	Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	
33	Terkordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	3	60.910.000	3	Dokumen	56.714.000	100,00	Dokumen	93,11	Dokumen perencanaan (Renja Mumi 2026, Renja Perubahan 2025, Renstra PD 2025-2029) telah disusun dan	kemungkinan Keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan perangkat daerah	Memastikan perangkat daerah mengumpulkan dokumen perencanaan tepat waktu agar tidak mengganggu
34	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3	63.515.000	3	Laporan	54.791.000	100,00	Laporan	86,26	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan,	Waktu tindaklanjut perangkat daerah yang relatif lama	Memastikan keselaran dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RKPd/RPJMD dan sesuai
35	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	4	14.650.000	3	Laporan	5.640.000	75,00	Laporan	38,50	Monitoring dilakukan secara rutin per triwulan, proses monev dilakukan dengan pemantauan realisasi kegiatan	Kurangnya kemampuan intervensi dalam memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti	Terus memantau dan berkoordinasi untuk memastikan rekomendasi monev telah ditindaklanjuti
	Terkordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD, dan RKPd)	Jumlah Dokumen PerencanaanPembangunan Daerah Bidang SDA yang DikoordinirPenyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	0		0	Dokumen		0,00	Dokumen	-			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											92			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			

NO	TUJUAN/SASARAN	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (outcome) / KEGIATAN (output) / SUB KEGIATAN (sub output)	TRIWULAN					TINGKAT CAPAIAN KINERJA (%)			IMPLIKASI		TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN
				TARGET RENJA 2025		REALISASI RENJA TW III			83,33	Persen	49,06	FAKTOR PENDORONG	FAKTOR PENGHAMBAT	
12	terlaksananya koordinasi perencanaan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan	5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	persentase perangkat daerah Sub bidang Infrastruktur yang mendapatkan rekomendasi pada forum koordinasi perangkat daerah	90	174.938.400	75	Persen	85.825.600				100,00	Persen	49,06
	terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan perangkat daerah		Jumlah laporan hasil koordinasi pelaksanaan perencanaan pembangunan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur	3		3	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus				
	Tersedianya data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sesuai ketentuan		Persentase data sinkronisasi rancangan dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur sesuai ketentuan	100		100	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus				
	Terlaksananya proses sinkronisasi dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen pemerintah daerah		jumlah perangkat daerah sub bidang Infrastruktur yang menerima rekomendasi hasil sinkronisasi	17		17	Perangkat Daerah		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus				
	Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah		jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah sub bidang Infrastruktur	3		3	Dokumen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus				
	Terlaksananya Asistensi Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		persentase Rekomendasi Hasil Asistensi dokumen perencanaan perangkat daerah yang telah ditindaklanjuti perangkat daerah sub Bidang Infrastruktur	100		100	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus				
	Terlaksananya Monitoring Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah		Persentase rekomendasi monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah sub bidang Infrastruktur yang ditindaklanjuti	100		100	Persen		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus				
			Jumlah perangkat daerah sub bidang Infrastruktur yang mendapatkan rekomendasi monitoring dan evaluasi	17		17	Perangkat Daerah		Bahwa penyusunan dokumen berdasarkan peraturan yang berlaku yaitu Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai pedoman	Tindaklanjut perangkat daerah atas rekomendasi yang memakan waktu relatif lama sehingga harus				
36	Terkoordinirnya penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD, dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir/penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	73.942.000	3	Dokumen	49.747.000	100,00	Dokumen	67,28	Dokumen perencanaan (Renja Mumi 2025, Renja Perubahan 2025, Renstra PD 2025-2029) telah disusun dan ditandatangani	kemungkinan Keterlambatan pengumpulan dokumen perencanaan perangkat daerah	Memastikan perangkat daerah mengumpulkan dokumen perencanaan tepat waktu agar tidak mengganggu implementasi kegiatan
37	Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.02 Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3	74.906.400	3	Laporan	26.002.600	100,00	Laporan	34,71	Asistensi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan	Waktu tindaklanjut perangkat daerah yang relatif lama	Memastikan keseleran dokumen perencanaan perangkat daerah dengan RKPD/RP/MD dan sesuai
38	Tersedianya laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4	26.090.000	3	Laporan	10.076.000	75,00	Laporan	38,62	Monitoring dilakukan secara rutin per triwulan, proses move dilakukan dengan pemantauan realisasi kegiatan	Kurangnya kemampuan intervensi dalam memastikan rekomendasi telah ditindaklanjuti	Terus memantau dan berkoordinasi untuk memastikan rekomendasi move telah ditindaklanjuti
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											92			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			
Rata - rata Capaian Kinerja Kegiatan (Persen)											97			
Predikat Kinerja Kegiatan											Sangat Tinggi			
Rata-rata Capaian Kinerja Sub Kegiatan (Persen)											97			
Predikat Kinerja Sub Kegiatan											Sangat Tinggi			

